

TESIS

**AKIBAT HUKUM PENCAIRAN KREDIT FIKTIF DENGAN
MENGUNAKAN COVERNOTE (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG NOMOR 21/PID.SUS
TPK/2021/PN PGP)**



Disusun Oleh:

JERI GUNARKO SYAHIDA

NIM: 2120122024

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. AZMI FENDRI, SH., M.KN

Dr. MISNAR SYAM, SH., M.HUM

PROGRAM MAGISTER HUKUM KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

2024

**AKIBAT HUKUM PENCAIRAN KREDIT FIKTIF DENGAN
MENGUNAKAN COVERNOTE (STUDI KASUS PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG NOMOR
21/PID.SUSTPK/2021/PN PGP)**

Jeri Gunarko Syahida, 2120122024, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Tahun 2024

ABSTRAK

Covernote tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya covernote berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Covernote dapat diartikan tidak termasuk sebagai akta autentik, karena covernote bukan merupakan sebuah akta yang diatur dan ditegaskan di dalam Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Bagaimana kedudukan covernote dalam perjanjian kredit? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam kasus nomor 21/Pid.sus-TPK/2021/PN PGP terkait dengan keberadaan covernote dalam pencairan kredit? 3. Bagaimana akibat hukum pembuatan covernote dalam perjanjian kredit dalam kasus 21/Pid.sus-TPK/2021/PN PGP? Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder dengan metode pengumpulan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kedudukan hukum covernote notaris pada perjanjian kredit covernote digunakan sebagai dasar pencairan kredit. Covernote notaris seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar pencairan kredit, karena covernote pada dasarnya hanyalah jaminan sementara. Covernote yang dibuat oleh notaris biasanya hanya sebagai keterangan bahwa masih adanya proses pensertifikatan. Covernote tidak memiliki payung hukum karena tidak diatur dalam Peraturan Perundang-undangan baik Undang-Undang Perbankan maupun UUJN, sehingga akibat yang kemudian akan ditimbulkan oleh adanya covernote ini berlaku ketentuan hukum baik secara pidana. 2) Hakim mempertimbangkan bahwa dakwaan yang dikabulkan terhadap terdakwa notaris Gemara Handawuri adalah Pasal 3 undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pelanggaran yang dilakukan adalah tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim telah sesuai untuk menjatuhkan hukuman kepada notaris Gemara Handawuri dengan memperhatikan keterangan terdakwa, saksi, alat bukti yang menimbulkan kepastian hukum 3) Kreditur tidak memiliki kepastian hukum terkait jangka waktu berakhirnya Cover Note, sehingga hal ini berdampak kepada tidak adanya kepastian mengenai jangka waktu penyerahan sertifikat

Kata Kunci: Kredit, Covernote, Notaris

CONSEQUENCES OF FICTITIOUS CREDIT DISCLOSURE USING COVERNOTE (CASE STUDY OF PANGKAL PINANG STATE COURT RULING NUMBER 21/PID.SUS-TPK/2021/PN PGP)

Jeri Gunarko Syahida, 2120122024, Master of Kenotariatan Faculty of Law, Andalas University, Year 2024

Abstract

Covernote is not regulated in the Notary Office Law (UUJN), so the consequences caused by the existence of covernote apply general legal provisions, both civil and criminal. Covernote can be interpreted not included as an authentic deed, because covernote is not a deed that is regulated and affirmed in laws and regulations. The purpose of this research is to find out: 1. How does covernote rank in credit agreements? 2. How is the consideration of the judge in case number 21 / Pid.sus-TPK/2021 / PN PGP related to the existence of covernote in credit disbursement? 3. What are the legal consequences of making a covernote in a credit agreement in case 21 / Pid.sus-TPK/2021/PN PGP? The method of approach used in this study is the method of normative juridical approach. Research specifications used are descriptive analytical research. This type of data using primary data and secondary data with the method of collecting literature studies. The method of data analysis used in this study is descriptive analysis. The results were concluded: 1) legal status of notary covernote on credit agreement covernote is used as the basis for credit disbursement. Notarial covernotes should not serve as a basis for credit disbursement, since they are essentially just a temporary guarantee. Covernote made by a notary is usually only as evidence that there is still a certification process. Covernote does not have a legal umbrella because it is not regulated in the laws and regulations of both the Banking Act and the UUJN, so that the consequences that will then be caused by the existence of this covernote apply legal provisions both criminally. 2) the judge considered that the indictment granted against the defendant notary Gemara Handawuri is Article 3 of the law of the Republic of Indonesia number 31 of 1999 concerning the eradication of corruption, namely the offense committed is a corruption offense. Consideration of the judge is appropriate to impose a sentence on the notary Gemara Handawuri by taking into account the information of the defendant, witnesses, evidence that raises legal certainty 3) the creditor does not have legal certainty regarding the expiration of the Cover Note, so this has an impact on the absence of certainty regarding the period of submission of the certificate

Keywords: Credit, Covernote, Notary